



PEMERINTAH KOTA BATU SEKRETARIAT DAERAH

Balaikota Among Tani, Gedung A, Lt. 4
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 512230 Fax (0341) 594444,
BATU 65313

P E N G U M U M A N **NOMOR : 810/313/422.000/IX/2023**

TENTANG **SELEKSI PENERIMAAN** **PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)** **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU** **TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2023 Nomor : 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2023, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi PPPK untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP), dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK Pemerintah Kota Batu Tahun 2023.

II. ALOKASI FORMASI

Formasi **Jabatan Fungsional Teknis** sejumlah **303 (Tiga Ratus Tiga)** dengan rincian nama jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, jenis formasi dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I pengumuman ini.

III. KETENTUAN UMUM

1. Jenis Kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - a. Khusus; dan
 - b. Umum
2. Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan formasi PPPK khusus meliputi :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).
3. Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan formasi PPPK umum meliputi :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN); atau
 - c. Pelamar diluar huruf a dan huruf b.
4. Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
5. Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
6. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun;
7. Pengalaman sebagaimana dimaksud angka 5 dan 6 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja (format surat keterangan pengalaman kerja sesuai lampiran IV dan V);
8. Rincian penentuan jenis kebutuhan formasi PPPK Khusus, Umum dan Disabilitas sebagaimana lampiran I pengumuman ini;
9. Seleksi Pengadaan PPPK terdiri dari :
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi kompetensi.
10. Peserta pada jenis kebutuhan formasi PPPK khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
11. Pengisian jenis kebutuhan formasi PPPK khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
12. Dalam hal masih terdapat jenis kebutuhan formasi PPPK khusus yang belum terpenuhi setelah angka 11 diberlakukan maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik;
13. Peserta pada jenis kebutuhan formasi PPPK umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

IV. PERSYARATAN UMUM

1. Usia pelamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Pelamar wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. Pelamar sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Pelamar tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
10. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP CPNS/NI PPPK;
11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
13. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan/melampirkan :
 - 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat/ tingkat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Menyampaikan/ mengunggah video singkat dengan durasi maksimal 5 (lima) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar wajib mengunggah video melalui akun google drive masing-masing, kemudian menyampaikan link video kepada panitia melalui google form pada website <https://bkpsdm.batukota.go.id/> atau melalui link bit.ly/BuktiDisabilitas2023 untuk dilakukan pengecekan.

V. PERSYARATAN KHUSUS

1. Dalam pengadaan PPPK Tahun 2023 terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis;
2. Berikut adalah persyaratan wajib yang harus dilampirkan sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023 :

NO	JABATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN
1	Ahli Pertama - Analis Kebakaran	a. Surat Keterangan Sehat b. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas
2	Pemula - Pemadam Kebakaran	a. Surat Keterangan Sehat b. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas
3	Pemula - Pranata Pencarian Dan Pertolongan	a. Persyaratan Administrasi 1) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas. 2) Surat Keterangan Bukan Buta Warna yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah 3) Surat Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah 4) usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5-10 tahun dan memiliki minimal 10 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas 5) usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3-5 tahun dan memiliki minimal 5 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas 6) usia 20-35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki minimal 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas b. Lulus Pemeriksa Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan Supervisi Basarnas. Pemeriksaan Kesehatan meliputi: 1) Tinggi badan minimum peserta : - Perempuan 157 cm; dan - Laki-laki 163 cm. 2) Indeks Masa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d. 26.

NO	JABATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN
		c. Lulus Tes Kesemaptaan <ul style="list-style-type: none"> - Tes Kesemaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. - Nilai minimum tes kesemaptaan adalah 40. - Test kesemaptaan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tes Samapta A yang berupa lari 2.400 meter; 2) Tes Samapta B yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Push Up 1 menit; - Sit Up 1 menit; - Pull Up 1 menit. d. Lulus tes kemampuan berenang sejauh 50 meter.
4	Pemula - Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat otomotif yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku, dikecualikan bagi Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMK Otomotif

3. Pelamar **wajib membaca** Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, terkait **sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis** untuk selanjutnya diupload ke SSCASN bagi yang memiliki.

VI. MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi dan pendaftaran seleksi penerimaan PPPK yang dibutuhkan Pemerintah Kota Batu Tahun 2023 dapat dilihat pada situs <https://batukota.go.id/>, <http://bkpsdm.batukota.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib memiliki Surat Elektronik (e-mail) yang masih aktif;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;

5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2023, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2023, dan Kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
7. **Dokumen persyaratan diunggah** melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 tampak depan berlatar belakang merah, posisi portrait;
 - c. Swafoto/selfie sesuai ketentuan dalam SSCASN;
 - d. Ijazah asli (**bukan** Surat Keterangan Lulus)
 - Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan (dokumen tersebut digabung dengan dokumen ijazah dalam 1 file ijazah);
 - e. Transkrip Nilai Asli;
 - f. Surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Batu di Batu, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani pelamar, discan berformat PDF dan bermaterai elektronik (e-materai) Rp. 10.000;
Contoh surat lamaran dapat dilihat sebagaimana lampiran II dalam pengumuman ini
 - g. Surat pernyataan 5 Poin bermaterai elektronik (e-materai) Rp. 10.000 dan ditandatangani pelamar;
Contoh surat Pernyataan dapat dilihat sebagaimana lampiran III dalam pengumuman ini
 - h. Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi pelamar jenis kebutuhan formasi PPPK Khusus dan Umum sebagaimana lampiran IV dalam pengumuman ini;
 - i. Surat Keterangan Aktif Bekerja bagi pelamar jenis kebutuhan formasi PPPK Khusus sebagaimana lampiran V dalam pengumuman ini;
 - j. Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas), serta mengunggah video singkat dengan durasi maksimal 5 (lima) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar wajib mengunggah video melalui akun google drive masing-masing, kemudian menyampaikan link video kepada panitia melalui google form pada website <https://bkpsdm.batukota.go.id/> atau melalui link bit.ly/BuktiDisabilitas2023 untuk dilakukan pengecekan.
 - k. Contoh Surat dapat di unduh di <http://bkpsdm.batukota.go.id/>
 - l. Dokumen sebagaimana huruf a sampai j diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran (SSCASN);

m. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli, apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
(Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini untuk membaca Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023)

VIII. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia seleksi;
3. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

IX. MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan;
6. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti adanya pemalsuan dokumen secara otomatis dianggap gugur dan akan diproses sesuai peraturan perundang – undangan;
2. Seluruh dokumen persyaratan yang dibuat, ditandatangani, diunggah dan dijadikan dasar persyaratan oleh pelamar, kebenaran akan dokumen tersebut merupakan tanggung jawab pelamar;
3. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. Meninggal dunia;Maka Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan

yang bersangkutan.

4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
5. Dalam hal pelamar sudah mendapatkan Nomor Induk PPPK dan kemudian mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak dapat melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
6. Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan PPPK Pemerintah Kota Batu tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Pengadaan PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kota Batu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Pemerintah Kota Batu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Batu Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani/memperdulikan penawaran untuk mempermudah proses pengangkatan sebagai PPPK Tahun 2023;
9. Kepada pelamar wajib memantau informasi terkini seputar pelaksanaan Penerimaan PPPK Pemerintah Kota Batu melalui media informasi resmi Pemerintah Kota Batu;

XI. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

No.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 September – 03 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September – 09 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September – 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 - 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 – 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 – 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 – 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 – 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober – 02 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	03 – 06 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November – 02 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November – 04 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November – 07 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	04 – 13 Desember 2023

* Jadwal Tentatif sesuai dengan ketentuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Batu, 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH



Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670404 198602 1 003

**RINCIAN FORMASI JABATAN
 PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNSIONAL TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1			1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU HUKUM	1			1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK PERTANIAN	1			1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI		1		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI		1		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU KOMPUTER		1		1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN	1		1	2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2			2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 PSIKOLOGI	1			1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
13	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK;S-1 AGRONOMI;S-1 KEHUTANAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	3			3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
14	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA/SEDERAJAT;SMK	18			18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA;S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS;S-1 FISIKA	2			2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
16	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK MESIN;S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI;S-1 SASRA INGGRIS;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	3			3	BADAN PENDAPATAN DAERAH
18	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1			1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
19	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1			1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
20	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	1		3	BADAN PENDAPATAN DAERAH
21	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2			2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
22	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI;S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2		1	3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
23	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SASRA INGGRIS	1			1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
24	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1			1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
25	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2			2	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
26	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA		1		1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
27	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	BAGIAN HUKUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
28	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	1		2	BAGIAN HUKUM
29	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI	2			2	BAGIAN HUKUM
30	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BAGIAN HUKUM
31	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KELAUTAN;S-1 KIMIA	1			1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
32	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUKUM	1			1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
33	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI		1		1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
34	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1			1	BAGIAN ORGANISASI
35	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	2			2	BAGIAN ORGANISASI
36	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1			1	BAGIAN PEMERINTAHAN
37	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1			1	BAGIAN PEMERINTAHAN
38	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI		1		1	BAGIAN PEMERINTAHAN
39	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	1			1	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
40	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN	1			1	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
41	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
42	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1			1	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
43	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
44	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
45	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PERPAJAKAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1			1	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
46	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
47	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1			1	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
48	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN	2			2	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
49	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK KOMPUTER	1			1	BAGIAN UMUM
50	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 BIOLOGI	2			2	BAGIAN UMUM
51	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2			2	BAGIAN UMUM
52	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	BAGIAN UMUM
53	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN	2			2	BAGIAN UMUM
54	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 PENDIDIKAN USAHA PERJALANAN WISATA	2	1		3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
55	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI	1			1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
56	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1			1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
57	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1			1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
58	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
59	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2			2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
60	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS KESEHATAN
61	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU INFORMATIKA	1			1	DINAS KESEHATAN
62	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 TEKNIK PENERBANGAN	2			2	DINAS KESEHATAN
63	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	DINAS KESEHATAN
64	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN	2	1		3	DINAS KESEHATAN
65	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK TEKSTIL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 SENI;S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU POLITIK;S-1 TELEVISI DAN FILM	1			1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
66	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 KOMPUTER APLIKASI	1			1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
67	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI	1			1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
68	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA	1			1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
69	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
70	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 STATISTIKA TERAPAN;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	2			2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
71	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA;S-1 SASTRA INGGRIS;S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	1		3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
72	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	1			1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
73	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
74	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	2			2	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
75	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN	2	1		3	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
76	PEMULA - PENGAMAT TERA	SMA IPA;SMA IPS;SMK	5			5	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
77	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
78	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
79	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER		1		1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
80	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN	1			1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
81	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 BIOLOGI;S-1 KIMIA	1			1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
82	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	SMA IPA;SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN;SMK TEKNIK PERAWATAN GEDUNG;SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN;SMK KONSTRUKSI GEDUNG DAN SANITASI	8			8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 HUKUM;S-1 TEKNIK SIPIL	1			1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
84	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
85	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ANALIS KIMIA;D-III TEKNIK ELEKTRO;D-III AKUNTANSI	2	1		3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SASTRA INDONESIA;S-1 SASTRA INGGRIS	1			1	DINAS PARIWISATA
87	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SASTRA JEPANG;S-1 SASTRA PERANCIS;S-1 MANAJEMEN		1		1	DINAS PARIWISATA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
88	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III BAHASA INGGRIS	1			1	DINAS PARIWISATA
89	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	DINAS PARIWISATA
90	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK PENGAIRAN	1			1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	D-III TEKNIK SIPIL	1			1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK MESIN	2			2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93	PEMULA - PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMA IPA;SMK TEKNIK PERAWATAN GEDUNG;SMK DESAIN INTERIOR DAN TEKNIK FURNITUR;SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN;SMK TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	5	3		8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA	2	1		3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
96	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI		1		1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
97	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	1			1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
98	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2			2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
99	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III AGRIBISNIS PERIKANAN	2			2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
100	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
101	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI	1			1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
102	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI	1			1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
103	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 ILMU HUKUM	2		1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
104	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 TEKNIK SIPIL	2			2	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
105	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	10	8		18	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
106	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 MANAJEMEN	1			1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
107	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU HUKUM;S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 PENDIDIKAN TATA NIAGA;S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI;S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH;S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	2	1		3	DINAS PENDIDIKAN
108	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS PENDIDIKAN
109	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN;S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN	2			2	DINAS PENDIDIKAN
110	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III TEKNIK ELEKTRO	2			2	DINAS PENDIDIKAN
111	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 TEKNIK GEODESI	3			3	DINAS PERHUBUNGAN
112	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SMA IPA;SMK MESIN;SMK OTOMOTIF;SMK ELEKTRO	5			5	DINAS PERHUBUNGAN
113	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI		1		1	DINAS PERHUBUNGAN
114	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS	2			2	DINAS PERHUBUNGAN
115	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM	2			2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
116	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1		1	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
117	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI		1		1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
118	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI	2			2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
119	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PRODUKSI PETERNAKAN	1			1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
120	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III HORTIKULTURA	1			1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
121	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI		1		1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
122	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 BUDIDAYA HUTAN	2			2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
123	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
124	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	2			2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
125	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN;S-1 TEKNIK GEODESI	1			1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
126	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUKUM	1			1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
127	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
128	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	2			2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
129	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 ILMU HUKUM	2	1		3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
130	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK GEODESI	2	1		3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
131	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1			1	DINAS SOSIAL
132	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU HUKUM	2		1	3	DINAS SOSIAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
133	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			1	DINAS SOSIAL
134	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1			1	DINAS SOSIAL
135	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	1	1		2	DINAS SOSIAL
136	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI	2			2	DINAS TENAGA KERJA
137	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN	2			2	DINAS TENAGA KERJA
138	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1		2	DINAS TENAGA KERJA
139	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI	2			2	DINAS TENAGA KERJA
140	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI	1			1	INSPEKTORAT
141	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	INSPEKTORAT
142	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN	2	1		3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
143	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU HUKUM	1			1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
144	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
145	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
146	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 MANAJEMEN	2		1	3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
147	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	KECAMATAN BATU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
148	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN;S-1 MATEMATIKA	1			1	KECAMATAN BATU
149	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN PEMASARAN	1			1	KECAMATAN BATU
150	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	3			3	KECAMATAN BATU
151	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER		1		1	KECAMATAN BUMIAJI
152	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1			1	KECAMATAN BUMIAJI
153	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	3			3	KECAMATAN BUMIAJI
154	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER		1		1	KECAMATAN JUNREJO
155	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI	1			1	KECAMATAN JUNREJO
156	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2			2	KECAMATAN JUNREJO
157	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 GEOGRAFI;S-1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN;S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN;S-1 PENDIDIKAN PPKN;S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA;S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN;S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN;S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA	1			1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
158	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1			1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
159	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA		1		1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
160	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SENI TARI	2			2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
161	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2			2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
162	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU MANAJEMEN	2			2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	JUMLAH	
163	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	D-III ADMINISTRASI KEUANGAN;D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	2			2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
164	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	1	1		2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
165	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 AGAMA ISLAM	3			3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TOTAL			242	55	6	303	

Batu, 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670404 198602 1 003

Contoh Surat Lamaran

....., 2023

Yth. **Wali Kota Batu**
di
Batu

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Alamat :
6. Formasi yang Dilamar : - Formasi *Khusus / Umum / Disabilitas (pilih salah satu)*
- *(nama jabatan yang dilamar)*
- *(lokasi penempatan yang dilamar)*
7. Pendidikan terakhir : SMA/D-III/D-IV/S-1 (jurusan/prodi)
Tanggal Lulus : dd-mm-yyyy (*yang tertera di ijazah*)
IPK :
8. Nomor Telepon/HP :
9. Email :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagai *(nama jabatan yang dilamar)* di *(lokasi penempatan yang dilamar)* pada Formasi *Khusus / Umum / Disabilitas (pilih salah satu)*

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

1. Scan Asli KTP Elektronik
2. Scan Asli IJAZAH
3. Scan Asli Transkrip Nilai
4. Pas photo warna ukuran 4 x 6
5. Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja
6. Scan dokumen Pendukung lainnya, dengan rincian :
 - a. Surat Pernyataan 5 Poin
 - b. Sertifikat ...
 - c. dst.

Demikian surat lamaran ini saya ajukan untuk dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-Materai
Rp. 10.000,-

(nama lengkap)

Contoh Surat Pernyataan 5 Poin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

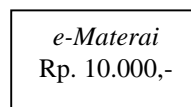
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,



(nama lengkap)

Lampiran IV : Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Batu
Nomor : 810/304/422.000/IX/2023
Tanggal : 16 September 2023

Contoh Surat Keterangan

Bagi Pelamar Jenis Kebutuhan Formasi PPPK Khusus dan Umum

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Unit Kerja :
5. Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Usia :
4. Pendidikan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :
7. Masa Kerja : tahun ... bulan

Yang bersangkutan melamar pada formasi (*jabatan yang dilamar*) di (*nama unit penempatan yang dilamar*) dan telah memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar mulai tanggal sampai dengan, dan selama bekerja tidak pernah menerima hukuman disiplin.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai persyaratan mendaftar seleksi PPPK.

....., 2023

Yang membuat pernyataan,
Pimpinan Unit Kerja

Materai Rp. 10.000,-

.....(nama terang).....

.....(nomor Pegawai)....

Lampiran V : Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Batu
Nomor : 810/304/422.000/IX/2023
Tanggal : 16 September 2023

Contoh Surat Keterangan

Bagi Pelamar Jenis Kebutuhan Formasi PPPK Khusus

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Unit Kerja :
5. Instansi : Pemerintah Kota Batu

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Usia :
4. Pendidikan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi : Pemerintah Kota Batu
7. Masa Kerja : tahun ... bulan

Yang bersangkutan melamar pada formasi (*jabatan yang dilamar*) di (*nama unit penempatan yang dilamar*) dan **telah bekerja secara terus menerus pada Instansi Pemerintah Kota Batu** mulai tanggal sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai persyaratan mendaftar seleksi PPPK.

..... , 2023

Yang membuat pernyataan,
Pimpinan Unit Kerja

Materai
Rp. 10.000,-

.....(nama terang).....
.....(nomor Pegawai)....